

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD TAHUN BUKU 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi sebagai wadah kegiatan kebersamaan dalam rangka saling membantu diantara sesama anggota perlu dikelola secara serius dan profesional. Dalam pengelolaan tersebut perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol atau pengawasan. Hal tersebut penting dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh anggota Koperasi. Oleh karena itu, komitmen dari pengurus dalam menjalankan fungsi manajemen sangat diperlukan. Pengawasan sebagai salah satu fungsi untuk mengontrol jalannya koperasi turut mewarnai apakah koperasi masih dalam kondisi sehat atau tidak. Dengan melakukan pengawasan secara intensif dan pembinaan dapat membantu pengurus dalam menjalankan tugas dan pengembangannya sesuai dengan AD/ART Koperasi Balitbang yang dipertanggungjawabkan dihadapan seluruh anggotanya dalam rapat anggota tahunan (RAT).

RAT Koperasi merupakan forum pertemuan seluruh anggota, pengurus, dan pengawas dalam mewujudkan demokrasi dengan menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat serta kekeluargaan. Di samping itu, RAT juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dan silaturahmi antara sesama Anggota, Pengurus, Pengawas, Pengarah, dan Penasihat Koperasi Balitbang.

B. Tujuan

Tujuan Pengawasan ialah untuk memberikan rekomendasi dalam peningkatan usaha koperasi berdasarkan data dan informasi capaian pengurus, hambatan yang ditemui, dan upaya pengembangan koperasi.

Data dan informasi yang dicermati yaitu:

1. Realisasi Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) yang telah ditetapkan pada RAT tahun lalu;
2. Kondisi dan hambatan kegiatan unit-unit usaha yang dilakukan oleh masing-masing unit usaha selama satu tahun (2017);
3. Pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan koperasi.

C. Metode Pengawasan

Pengawasan Koperasi dilakukan melalui berbagai pertemuan secara berkala terkait dengan pelaksanaan program kerja setiap Bidang Usaha Koperasi (I, II, dan III) dengan cara melakukan pengawasan (*stock opname*). Selanjutnya, melakukan kunjungan langsung dan menindaklanjuti observasi dokumen/barang, melakukan wawancara dan penandataan (*Check list*) serta memberikan masukan saran perbaikan atas hasil temuan dan diakhiri dengan penanda tangan hasil pemeriksaan.

Selain itu, sesuai arahan Pembina Koperasi dan amanah RAT Tahun Buku 2016, pada kegiatan usaha 2017 dilakukan juga Pengawasan oleh pihak eksternal, yaitu Kantor Akuntan Publik.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. Organisasi

1. Keanggotaan

Berdasarkan data Kepegawaian Balitbang Kemendikbud pada posisi Desember 2017 jumlah pegawai Balitbang sebanyak 508 orang dan yang telah terdaftar menjadi anggota koperasi berjumlah 381 orang atau 75%. Masih terdapat 127 orang atau 25% yang belum masuk anggota Koperasi Balitbang (terutama dari Puslit Arkenas).

2. Kepengurusan

Kepengurusan koperasi periode 2016-2018 dibentuk berdasarkan Keputusan RAT Tahun Buku 2015 yang dipilih secara demokratis.

B. Bidang Usaha Simpan Pinjam

Bidang usaha simpan pinjam pengurus koperasi memperoleh jasa simpanan pada akhir tahun 2017 sebesar **Rp 1.113.914.664,-**, sedangkan targetnya sebesar **Rp 1.162.800.000,-**, sehingga capaian yang diperoleh 95,8% dari target yang sudah ditetapkan.

C. Bidang Usaha Toko Koperasi

Kegiatan bidang usaha pertokoan, pengurus koperasi tahun 2017 mempunyai keuntungan sebesar **Rp 538.516.701,-**, sedangkan targetnya sebesar **Rp 480.063.195,-**, sehingga capaian yang diperoleh 112,2% dari target yang sudah ditetapkan. Jumlah capaian tersebut termasuk antara lain digunakan untuk biaya operasional

toko, seperti sewa tempat dan gaji karyawan, serta pengelolaan toko melalui aplikasi.

D. Bidang Usaha Jasa Foto Copy dan Tiketing

Kegiatan bidang usaha jasa foto copy dan tiketing, pengurus koperasi tahun 2017 mempunyai keuntungan sebesar **Rp 206.443.511,-**, sedangkan targetnya sebesar **Rp 380.400.000,-**, sehingga capaian yang diperoleh 54,27% dari target yang sudah ditetapkan. Jumlah capaian antara lain digunakan untuk kebutuhan biaya operasional, seperti sewa tempat dan gaji karyawan.

E. Pengembangan pengelolaan koperasi:

Pengelolaan sistem administrasi sudah berbasis aplikasi, khususnya bidang usaha Toko, dan ke depan akan dikembangkan menuju sistem transaksi non tunai. Selain itu, dengan telah didaftarkannya koperasi menjadi wajib pajak yang dibuktikan dengan memiliki NPWP tersendiri, maka koperasi mulai menerapkan pajak.

Untuk menjamin keamanan simpanan anggota, mengingat pada tahun lalu banyak anggota yang terkena musibah dan hal tersebut belum diantisipasi oleh pengurus, maka koperasi mulai menerapkan asuransi kepada semua anggota yang akan memanfaatkan jasa pinjaman. Kerjasama dengan unit yang lain seperti PKPRI, Dinas Koperasi, dan Best Practice dari Koperasi lain juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan usaha.

AD/ART yang lama telah disesuaikan mengikuti perkembangan kebutuhan yang ada. Hal tersebut telah dibahas pada pada RAT 2016.

Selain itu, sesuai arahan Pembina koperasi dan amanah RAT 2016, pengawasan koperasi telah dilengkapi dengan pengawasan oleh audit pihak eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik.

F. Hambatan yang Ditemui

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pengurus, dalam menjalankan usaha koperasi ditemui beberapa hambatan sebagai berikut.

- a. Suku Bunga dan tenor kurang kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya;
- b. Modal Pinjaman yang kurang produktif;
- c. Anggota yang kurang disiplin dalam pembayaran angsuran pinjaman;
- d. Kemampuan SDM, terutama pada Bidang 3 masih kurang;
- e. Belum terealisasinya unit usaha di kawasan Kantor Gunung Sahari.

G. Pengawasan oleh Pihak Eksternal (Kantor Akuntan Publik)

Pada tahun 2017, kegiatan usaha koperasi telah diaudit oleh auditor profesional dari Kantor Akuntan Publik, yakni Richard Risambessy & Rekan. Hasil auditnya adalah sebagai berikut.

1. Opini

Laporan keuangan koperasi dinilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

2. Analisa Ratio Keuangan

- a) Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek.

Asset lancar = Rp 8.248.836.120,-

Kewajiban lancar = Rp 1.898.012.035,-

Likuiditas = $\text{Asset lancar} : \text{kewajiban lancar} = 4,3460$
(434,60%)

- b) Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang.

Asset = Rp 8.316.084.580,-

Hutang = Rp 1.898.012.035,-

Solvabilitas = Asset : Hutang = 4,3815 (438,15%)

c) Rentabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

SHU tahun berjalan = Rp 630.877.192,-

Ekuitas sebelum SHU tahun berjalan = Rp 5.787.195.353,-

Rentabilitas = SHU tahun berjalan : Ekuitas sebelum SHU tahun berjalan = 0,1090 (10,90%)

BAB III

KESIMPULAN

Hasil Pengawasan Koperasi Balitbang Tahun Buku 2017 menunjukkan bahwa Bidang Usaha I, II, dan III telah bekerja sesuai dengan program kerja yang disepakati. Pengelolaan usaha terus dikembangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, ikut berkontribusi dalam membangun Negara melalui pembayaran pajak, meningkatkan keamanan simpanan anggota dengan mengikutsertakan dalam asuransi, dan meningkatkan kerjasama dengan unit/lembaga lain.

Namun demikian beberapa kendala masih ditemui yakni suku bunga dan tenor kurang kompetitif, modal pinjaman yang kurang produktif, anggota yang kurang disiplin dalam pembayaran angsuran pinjaman, dan kemampuan SDM yang masih kurang.

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan pemeriksaan data yang ada dan perkembangan koperasi yang telah diperoleh Pengurus Koperasi Balitbang Kemendikbud Tahun Anggaran 2017, Pengawas merekomendasikan kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT), bahwa Program Pengurus Koperasi Balitbang Kemendikbud perlu ditingkatkan dalam mengembangkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang proporsional pada Tahun Anggaran 2018, yaitu:

1. Memperpanjang tenor agar lebih kompetitif;
2. Mengoptimalkan modal pinjaman ke bentuk usaha lain;
3. Seluruh anggota Koperasi agar disiplin dalam melakukan pembayaran pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Peningkatan SDM karyawan, terutama di Bidang 3;
5. Melakukan advokasi dan menghimbau kepada pengelola keuangan di masing-masing unit kerja di lingkungan Balitbang untuk meningkatkan daya beli dengan memanfaatkan bidang usaha koperasi;
6. Seluruh anggota Koperasi meningkatkan komitmennya untuk senantiasa berupaya menambah asset Koperasi, melalui simpanan sukarela;
7. Segera merealisasikan unit usaha di kawasan Kantor Gunung Sahari.
8. Meningkatkan kemampuan pengurus dan pengkaderan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha;
9. Mengembangkan Jumlah Anggota Koperasi, khususnya di lingkungan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas);
10. Pengembangan usaha koperasi agar dilaksanakan sesuai dengan AD/ART baru yang disepakati dalam forum RAT;

BAB V
PENUTUP

Koperasi Balitbang Kemendikbud sebagai unit usaha dan kerja sama diantara anggota memiliki peran penting bagi anggota dalam membantu para anggota untuk pemenuhan kebutuhan para anggota Koperasi. Oleh karena itu, Koperasi Balitbang harus dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh anggotanya.

Jakarta, 28 Februari 2018

PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD

Ketua,

Sekretaris,

Yuanita Rosyanti

Nur Berlian Venus Ali

Anggota,

Asri Joko Surono

H. Sidik Pranyoto

Tugiyo